



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

KURIKULUM

2021

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)



MB -KM

MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

**FAKULTAS SYARIAH
UINSI SAMARINDA**

RANCANGAN KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS
MERDEKA PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena Berkat rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya rancangan kurikulum Merdeka belajar-Kampus Merdeka program Studi Hukum Tata Negara ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga Beliau. Karena perjuangan dan pengorbanan Beliau kita saat ini bisa merasakan nikmatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan kepada Permendikbud Nomor 3 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta peraturan pendukung yang lainnya. Penerapan Kampus Merdeka dipandang perlu dilakukan dengan harapan dapat mempersiapkan lulusan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Sehingga merdeka belajar merupakan salah satu solusi untuk melahirkan lulusan sarjana yang siap menghadapi perkembangan dunia.

Prodi Hukum Tata Negara, salah satu program studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang telah menyusun dan merancang kurikulum yang berbasis merdeka belajar-kampus merdeka. Diharapkan dengan penerapan kurikulum ini, Calon Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara dapat menghadapi masa depan dengan baik, bukan hanya pada kehidupannya, dunia kerja, tetapi perkembangan teknologi dan komunikasi.

Ucapan terima kasih kepada seluruh Pimpinan, Dosen, Sivitas Akademika, *Stake Holders*, Instansi dan Perguruan Tinggi yang telah bersedia bekerja sama mendukung penerapan kurikulum merdeka ini.

Kritik dan saran selalu diharapkan, untuk penyempurnaan kurikulum kampus merdeka ini ke depannya.

Samarinda, 24 Juni 2021

Tim Penyusun

Prodi Hukum Tata Negara

DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
A. PENDAHULUAN.....	5
B. PROFIL PROGRAM STUDI	6
C. VISI, DAN MISI PROGRAM STUDI HUKUM PRODI HUKUM TATA NEGARA.....	6
D. KEUNIKAN DAN KEUNGGULAN PRODI HUKUM TATA NEGARA	10
E. TUJUAN PROGRAM STUDI DAN ANALISIS KEBUTUHAN (<i>TRACER STUDY</i>)	11
F. PROFIL LULUSAN PRODI HUKUM TATA NEGARA.....	15
G. CAPAIAN PEMBELAJARAN	19
H. STRUKTUR KURIKULUM	25
I. RANCANGAN FASILITAS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	34
J. PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penetapan Profil Lulusan dan Deskripsi Profil	15
Tabel 2 : Capaian Pembelajaran Prodi Hukum Tata Negara.....	19
Tabel 3 : Struktur Mata Kuliah Prodi Hukum Tata Negara	25
Tabel 4 : Sebaran Mata Kuliah Prodi Hukum Tata Negara	29
Tabel 5 : Mata Kuliah Reguler Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	36
Tabel 6 : Mata Kuliah Lintas Prodi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	37
Tabel 7 : Mata Kuliah Lintas Fakultas Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	37
Tabel 8 : Mata Kuliah Reguler Semester Vi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	38
Tabel 9 : Mata Kuliah Lintas Perguruan Tinggi	39
Tabel 10 : Ketentuan SKS Praktik/Magang.....	39
Tabel 11 : Pertukaran Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi	40
Tabel 12 : Ketentuan Program KKN Tematik dan Skripsi.....	40
Tabel 13 : Calon Perguruan Tinggi Program Pertukaran Mahasiswa	47

RANCANGAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pembaharuan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuju Kampus Merdeka Belajar (KMMB). Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) melakukan perencanaan dan penyusunan kurikulum KMMB untuk memuat sekumpulan petunjuk dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menerapkan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbud No.3 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kurikulum berbasis Kampus Merdeka ini disusun dengan mengacu kepada profil Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga Visi Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai lulusan yang sesuai dengan Capaian Luaran yang relevan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia.

Kampus merdeka bertujuan untuk mempersiapkan lulusan kemampuan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan umum yang menjadi keunikan program studi, sehingga dapat melahirkan SDM yang mampu bersaing dan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Melalui merdeka belajar ini Prodi Hukum Tata Negara mempersiapkan proses pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

Berangkat dari tujuan tersebut dan peningkatan kualitas mutu Perguruan Tinggi Negeri, maka diperlukan pengembangan kurikulum akademik untuk meningkatkan keluaran yang ingin dicapai dari sebuah Perguruan Tinggi. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan statusnya sebagai Perguruan Tinggi Islam Negeri yang

mandiri, maka UIN Sultan Aji Muhammad Idris memiliki otonomi luas baik pengembangan akademik, ilmiah, manajemen, administrasi serta mengembangkan program-program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan nasional.

B. PROFIL PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Persoalan globalisasi baik di bidang Agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya menjadi problematika pendidikan pada abad ke-21 yang dirasa cukup kompleks. Dengan demikian Persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di beberapa negara di dunia dimana jika terjadi sesuatu di suatu wilayah pada saat tertentu, maka akan berpengaruh sama di wilayah lain. Ini dinamakan *era borderless world*. Kondisi ini menuntut adanya kesiapan dan persiapan pada level Perguruan Tinggi.

Program Studi atau disingkat dengan sebutan PRODI, yakni pada prodi Hukum Tata Negaras (Siyasah) yang di kenal dengan singkatan populernya adalah prodi HTN, namun bukanlah HTN Murni melainkan HTN Siyasah, dimana pada prodi ini merupakan sebuah wadah pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia yang in sya Allah handal dan mampu bersaing disertai kemampuan analisis, inovatif, dan memimpin, yang lebih kental berkecimpung pada dunia politik yang juga kental dengan keislamannya sehingga dapat memberikan solusi menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam dan mampu beradaptasi dengan peradaban lain.

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sudah sepatutnya menjadi pusat ilmu hukum Islam yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara potensi politik, umat dan budaya. Dengan demikian, yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh program studi ini adalah seperangkat keilmuan dasar Islam yang mampu memberikan kepada para mahasiswa pola berpikir kritis, cerdas, dan berkarakter serta universal terhadap nilai-nilai Islam serta ilmu politik dan kenegaraan dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah).

C. VISI, DAN MISI PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Perumusan visi dan misi Program Studi menjadi sangat penting, karena eksistensi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sangat tergantung dari kejelasan visi dan misi. Perumusan visi dan misi ini sejalan dengan *trend* pengelolaan perguruan tinggi yang ditandai adanya ciri-ciri: *good corporate*, modern, berbasis IT, dan *knowledge enterprizing*. Tuntutan ini telah disikapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) dengan mencanangkan *Higher Education Long Term Strategy* yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: *autonomy*, *organizational health*, dan *nation's competitiveness*.

Pengembangan tersebut harus terus dilakukan untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Tema-tema sentral yang berkembang dalam paradigma baru manajemen pendidikan tinggi dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang.

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UINSI Samarinda memiliki visi misi yang jelas. Visi dan misi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) telah menjadi kerangka acuan sivitas akademika serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat regional, nasional, dan global. Desain kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara dengan strukturnya lebih mengutamakan pada aspek Hukum Islam, Ilmu Hukum Umum dan implementasinya serta ilmu politik dan siyasah yang mana politik dimaksudkan tidak bertentangan dengan nilai – nilai keislaman (fiqih *Siyasah sariyyah*). Penonjolan ini disebabkan karena pentingnya kompetensi Hukum Islam dan memunculkan ilmu – ilmu politik yang erat kaitanya dengan *siyasah sariyyah*, kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam baik itu mengenai penguatan peraturan yang memang beranjak pada prinsip – prinsip keislaman. Juga pengamalan Ilmu Hukum pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum, serta diperlukan kemampuan untuk menerapkannya dalam ranah hukum secara nyata berlandaskan kepada keilmuan yang komprehensif dan mendalam.

Adapun Visi Prodi Hukum Tata Negara: **“Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Keislaman pada bidang Hukum Tata Negara Berbasis Pluralitas Ke-Indonesiaan.”** Adapun makna operasionalnya adalah:

- 1) Terdepan berarti “Paling Maju atau Paling Unggul”.
- 2) Pengembangan Peradaban Keislaman dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*) berarti “mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban keislaman dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*) melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.
- 3) Pluralitas keIndonesiaan bermakna : “Keberagaman atau kemajemukan bangsa Indonesia dan mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan”.

Indikator kejelasan visi dapat dilihat dari :

1. Kejelasan sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadi program studi yang menjadi pelopor pengembangan peradaban Keislaman pada bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*);
2. Kejelasan lulusan yang memiliki keilmuan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) berbasis pluralitas keislaman.

Indikator Terdepan:

Menjadi Program studi yang terdepan dalam pengembangan bidang Hukum Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang mengintegrasikan antara keilmuan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Hukum Islam dan juga Hukum Positif.

Indikator Pengembangan bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*) :

Beberapa indikator unggul yang dilahirkan dari prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), adalah:

1. Melahirkan lulusan yang mahir dalam bidang hukum dan politik;
2. Melahirkan lulusan yang memiliki keilmuan pada bidang hukum Islam dan juga Hukum Positif di Indonesia;
3. Melahirkan lulusan yang memiliki kekuatan spiritualitas yang baik;
4. Melahirkan lulusan yang berakhlak mulia;
5. Melahirkan lulusan yang berkompeten pada media berbasis digital.

Indikator Pluralitas Keindonesiaan:

Melahirkan lulusan yang profesional pada bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan Pluralitas Keindonesiaan yang mampu menyatukan kemajemukan masyarakat, sehingga memiliki *skill* untuk mampu berinteraksi dengan baik walaupun memiliki latar belakang yang berbeda.

Visi yang ingin dicapai sangatlah realistis untuk diwujudkan mengingat kemampuan, potensi, dan kesiapan lembaga serta dukungan semua sivitas akademik Fakultas Syariah UINSI Samarinda serta *stakeholders* untuk bersama-sama mewujudkan visi tersebut. Lebih rinci potensi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan infrastruktur
2. Kualitas sumber daya manusia meliputi dosen dan tenaga kependidikan
3. Jaringan kerjasama yang semakin kuat
4. Prasarana dan sarana pendukung.

Realisasi visi menjadi program studi rujukan tersebut dicapai dengan cara :

1. Memberikan mahasiswa kegiatan perkuliahan tatap muka di kelas (70%), dan kegiatan perkuliahan di luar kelas (30%) dalam bentuk magang serta KKN Tematik Kampus Merdeka yang merupakan komposisi ideal untuk program S1.
2. Menyiapkan tenaga atau sarjana profesional yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan berbasis pada kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional dalam konteks keIndonesiaan.
3. Membekali mahasiswa dengan mata kuliah keahlian Hukum keTata Negara (Siyasah)
4. Nilai-nilai moral keislaman diberikan melalui mata kuliah moderasi beragama Fikih Siyasah, Fikih Jinayah, Fiqih Muamalah, Fiqih Zakat, Fikih Munakahat, Fikih Mawaris.
5. Membekali mahasiswa dengan kemampuan tambahan seperti penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab serta kemampuan IT yang didukung dengan mata kuliah Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Information Technology Communication (ICT).
6. Melibatkan *stakeholder* dalam merumuskan mata kuliah. *Stakeholder* yang dilibatkan diantaranya adalah beberapa pengadilan di Samarinda seperti pengadilan Negeri

samarinda, Pengadilan Tata Usaha Samarinda, Pengadilan Agama, selain itu ada pula dari pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) baik tingkat Kota maupun tingkat provinsi, Pihak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), juga menghadirkan dari Komisi Yudisial (KY) kantor cabang penghubung Kota Samarinda, Kemenkumham, dan juga beberapa Advokat dari Perwakilan Asosiasi Pengacara Syariah yang juga merupakan bagian dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum)

7. Merumuskan misi, tujuan, strategi dan sasaran untuk mencapai visi tersebut yang dijelaskan di bawah ini.

Untuk melaksanakan visi program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UINSI Samarinda mengembangkan misi sebagai berikut:

- a) Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) (Muamalah) yang unggul berorientasi pada spiritualitas, intelektualitas, dan profesionalitas;
- b) Mengembangkan riset pada kajian Hukum Tata Negara (Siyasah) yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c) Mengembangkan pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berbasis pluralitas keindonesiaan.

Dari visi misi inilah dapat diterjemahkan bahwa tujuan dan target program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah untuk:

1. Menempah lulusan yang memiliki keilmuan pada bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)
2. Melahirkan lulusan yang berilmu pengetahuan keislaman yang baik.
3. Membekali mahasiswa sifat spritualitas.
4. Membekali mahasiswa bersifat intelektualitas.
5. Membekali mahasiswa bagaimana bersikap profesionalitas.
6. Mampu melakukan berbagai penelitian ataupun kajian riset yang berkaitan dengan bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).
7. Berkotribusi dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan melihat dan mengkaji perkembangan situasi kondisi dan kebutuhan masyarakat di masa kini.

8. Mengembangkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang kepada landasan pluralitas keindonesiaan.

D.KEUNIKAN DAN KEUNGGULAN PRODI HUKUM TATA NEGARA

Perubahan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, menjadikan banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk di dalamnya adalah filosofi tujuan dan visi misi Universitas. UINSI Samarinda, mempunyai paradigma integrasi keilmuan yaitu epistemologi keilmuan dengan konsep **“Sarang Lebah Madu”** yang membangun kerangka teori maupun asumsi dasar sebagai bangunan keilmuan. Sehingga kerangka keilmuan yang diterapkan pada setiap program studi tentu mesti berpedoman kepada konsep tersebut.

Berangkat dari konsep tersebut, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) memiliki kelebihan dan keunggulan yang berbeda dengan program studi lainnya, baik dari segi profil lulusan, keilmuan, dan juga kemampuan praktik yang profesional dan keindonesiaan menjadi tujuannya. Diantara keunggulan dan keunikan Prodi Hukum Tata Negara adalah sebagai berikut:

1. Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) telah menerapkan kurikulum yang berbasis KKNI dan juga kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM).
2. Keilmuan yang ditawarkan pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah Keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah), Hukum Islam dan juga Hukum Umum/ Positif.
3. Memiliki mata kuliah penunjang profesi Seperti:
 - a. mata kuliah Advokat, Hakim, Jaksa, Panitera yaitu dibekali dengan mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama,serta huukum Acara Peradilan mahkama Konstitusi
 - b. Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu.
 - c. Hukum Agraria dan Perwakafan
 - d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
 - e. Pembentukan Peraturan perundang – undangan
 - f. hukum Acara Mahkamah Konstitusi

- g. Hukum dan kebijakan public
 - h. Hukum Lingkungan
 - i. Digitalisasi dengan mata kuliah Information Communication and Technology (ICT) yang dituanglah dalam mata kuliah
 - j. Aplikasi E-commerce.
 - k. Profesional dalam Public Speaking dengan menguasai berbagai Bahasa Wajib Dunia yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan juga Bahasa Arab.
 - l. dan keilmuan lainnya yang mesti dimiliki oleh warga negara
 - m. Indonesia yaitu pancasila, civic education, dll.
4. Memiliki Pusat Studi penunjang keilmuan yang telah disusun pada kurikulum, didukung dengan ekstra kurikuler yang dapat mengembangkan wawasan dan keilmuan mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara. Diantara pusat studi yang dimiliki adalah:
- a) Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
 - b) Pusat Kajian Halal (PUKAHA)
 - c) Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah (LPHBS)
 - d) Pusat Kajian Hukum (PUSKUM)
 - e) Lembaga Kajian Ilmu Falak (LKIF)
 - f) Pusat Minat Bakat (PUSMINBA)
 - g) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
 - h) Borneo Mediation Center (BMC)

Mahasiswa dalam hal ini diberikan kebebasan untuk memilih keilmuan yang sesuai dengan minat dan *skill* yang ingin dikembangkan melalui fasilitas pusat studi Fasya Center yang telah disediakan untuk menampung kreatifitas mahasiswa menambah wawasan dan keilmuan dengan sistem relawan, praktik dan menjadi pengurus harian, pusat studi tersebut.

E. TUJUAN PROGRAM STUDI DAN ANALISIS KEBUTUHAN (*TRACER STUDY*)

Adapun tujuan Prodi Hukum Tata Negara adalah melahirkan sarjana yang bertakwa kepada Allah SWT, serta menguasai pengetahuan keislaman, memiliki kemampuan akademika dan profesional dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Tujuan yang akan dicapai dalam proses pendidikan pada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) adalah dengan Strategi pencapaiannya adalah:

1. Implementasi dan Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi
2. Untuk mengenerapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Prodi Hukum Tata Negara, maka diperlukan beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi.
 - b. Perumusan program kerja dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.
 - c. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.
3. Penguatan dan pengembangan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu Program Studi

Untuk menguatkan dan mengembangkan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, maka dilaksanakan beberapa hal, yaitu:

- a. Evaluasi tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- b. Evaluasi struktur organisasi agar efisien.
- c. Penyiapan dan pengembangan Karakteristik kepemimpinan yang efektif.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi.
- e. Evaluasi dan optimalisasi keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.
- f. Penyusunan dan implementasi standar mutu.

4. Peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan Program Studi

Dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan prodi, dibutuhkan beberapa langkah, diantaranya:

- a. Penyusunan dokumen dan implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.
- b. Evaluasi penerimaan mahasiswa baru reguler dan non reguler.
- c. Evaluasi Motivasi penerimaan mahasiswa transfer.
- d. Peningkatan rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK.
- b. Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan: jenis program yang dilakukan dan efektivitas pelaksanaannya.

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Program Studi

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada program studi, sangat dibutuhkan kecukupan dan kualifikasi SDM yaitu dengan melaksanakan:

- a. Evaluasi Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap Program Studi;
- b. Pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap;
- c. Tugas belajar dosen;
- d. mengembangkan tenaga dosen tetap;
- e. Evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan.

6. Evaluasi dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik yang memenuhi standar penjaminan mutu akademik Program Studi

Beberapa hal yang dilaksanakan Prodi Hukum Tata Negara untuk melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik yang sesuai dengan standar penjaminan mutu prodi, yaitu:

- a. Program Studi melakukan penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersistem dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
- c. Menyediakan :
 - 1) Kebijakan tentang suasana akademik yang jelas;
 - 2) Menyediakan sarana dan prasarana;
 - 3) Dukungan dana yang cukup;
 - 4) Kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.

7. Optimalisasi identifikasi penguatan dan pengembangan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi menuju Program Studi yang mandiri

Sebuah prodi yang mandiri membutuhkan kepada pengoptimalan dan pengembangan pembiayaan, serta sarana prasarana yang memadai, oleh karena itu dibutuhkan:

- a. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) secara efisien
- b. Upaya pengembangan dana.
- c. Investasi untuk pengadaan sarana
- d. Koordinasi Perbaikan mutu dan kecukupan akses prasarana.
- e. pengembangan prasarana untuk program studi
- f. Penyediaan Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi.
dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)
- g. Penyediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi. dalam administrasi (akademik, keuangan, personil, dll.)
- h. Aksesibilitas data dalam sistem informasi.
- i. Pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Program Studi dalam hal pendanaan.

8. Perluasan jaringan pengembangan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan mitra kerja Program Studi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan prodi adalah:

- a. Peningkatan dana dan jumlah kegiatan penelitian
- b. Pengembangan kegiatan penelitian
- c. Peningkatan dana dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- d. Pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat

9. Melahirkan Sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang mampu menerapkan, menyebarkan dan mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

10. Mengembangkan Hukum Islam yang berwawasan kemanusiaan dan berperadaban.

11. Mengembangkan budaya ijtihad dalam Hukum Islam secara multidisiplin bagi kepentingan akademik dan masyarakat.

12. Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Hukum Islam bagi terwujudnya masyarakat madani.
13. Mengembangkan Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

F. PROFIL LULUSAN PRODI HUKUM TATA NEGARA

Adapun Profil Lulusan Prodi Hukum Tata Negara ditargetkan dapat menjadi Praktisi Hukum meliputi Hakim, Advokat, Jaksa, serta Mediator, Konsultan Hukum; perancang peraturan perundnag - undangan, penelitian bidang hukum ketatanegaraan dan politik Islam, politisi, menjadi yang rincian profilnya sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Penetapan Profil Lulusan dan Deskripsi Profil

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL
1	Hakim	a. Mampu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan; b. Mampu menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan pendapat hukum jika diminta pemerintah.
2	Panitera	a. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan; b. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan; c. Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, pemberitahuan, penyampaian memori/kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.

3	Advokat	a. Mampu mendesain dan menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta surat permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali suatu perkara di pengadilan agama; b. Mampu menganalisis perkara-perkara dan yurisprudensi secara baik dan mendalam; c. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang Hukum Tata Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4	Mediator/ Konsultan Hukum	a. Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak dalam bidang hukum Tata Negara; b. Mampu memediasi para pihak terkait sengketa bidang hukum Tata Negara, sengketa ekonomi syariah dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi; c. Mampu melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional
5	Perancang peraturan perundang-undangan	Menjadi perancang undang-undang, peraturan daerah (Perda) di badan legislatif pusat/daerah maupun di instansi pemerintahan yang kompeten sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
6	Peneliti Bidang Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam	Menjadi peneliti atau asisten peneliti yang produktif dalam bidang Hukum Tata Negara, menguasai metodologi penelitian dengan baik dan mampu menganalisis permasalahan seputar hukum positif dan hukum Islam, ketatanegaraan maupun politik.
7	Politisi	Praktisi Hukum Tata Negara dan Ketatanegaraan Islam yang mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengambil keputusan di lembaga eksekutif maupun yudikatif

Dari tabel di atas dapat difahami bahwa Profil Lulusan pada Prodi Hukum Tata Negara adalah sebagai Legal Officer dan Drafter Kontrak Bisnis Syariah, Praktisi Hukum Ekonomi Syariah, Mediator Fasilitator dan Konsultan Hukum Ekonomi Syariah. Barangkat dari profil lulusan tersebut, Prodi Hukum Tata Negara juga telah menetapkan susunan keilmuan dan capaian pembelajaran untuk mencapai target lulusan sebagaimana yang telah ditetapkan.

G.CAPAIAN PEMBELAJARAN

Berdasarkan profil lulusan yang ingin dicapai dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, maka ditetapkan Capaian Pembelajaran untuk membekali mahasiswa keilmuan yang sesuai dan tersusun dengan baik berdasarkan luaran yang ingin dicapai.

Adapun Capaian Pembelajaran Prodi Hukum Tata Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Capaian Pembelajaran Prodi Hukum Tata Negara

No	Capaian Pembelajaran	Sumber Acuan
1	Aspek Sikap	
	1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain; 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di masyarakat dan di negara; 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan di tempat tugas dan di masyarakat; 11. Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di	SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTK dan FAI pada Perguruan Tinggi Tahun 2018

	masyarakat dan di negara; 12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya; 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi masyarakat; 14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas; 15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; 16. Menunjukkan etos kerja, rasa bangga, percaya diri dan menghargai bidang tugas masing-masing; 17. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas atas pekerjaan di bidang ekonomi syariah secara mandiri; 18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pekerjaan di bidang politik, hukum dan ketatanegaraan.	
2.	Aspek Pengetahuan	
	1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah	SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTK dan FAI pada Perguruan Tinggi Tahun 2018

	dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah dalam komunitas akademik dan non akademik; 5. Menguas ai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin; 6. Menguas ai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan; 7. Menguas ai langkah-langkah mengidentifikasi ragam ilmu dan kemandirian yang berlandaskan etika keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global; 8. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah. 9. Menguasai dasar-dasar fikih Siyasah dan fikih jinaya serta dalil-dalil yang berkaitn dengan ketatanegaraan (siyasah) 10. Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang Hukum Tata Negarayang integratif dan holistik. 11. Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang Hukum Tata Negara dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya 12. Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang Hukum Tata Negara dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya 13. Menguasai konsep dan teori ilmu Negara, ilmu politik, kebijakan public dan pembentukan perturan perundnag - undnagan 14. Menganalisa dan memahami metode penelitian dalam kajian hokum positif yang berkaitan dengan isu – isu sosial dan hukum yang ada dalam konteks kenegaraan dan birokrasi 15. Mampu memahami konsep politik dan agama dalam konteks kenegaraan.	
3.	Aspek Keterampilan Umum	
	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,	SKL dan CPL

sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil 4. kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 7. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja; Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 8. dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja; 9. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif	Jenjang Sarjana pada PTK dan FAI pada Perguruan Tinggi Tahun 2018
---	--

	(innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja; 10. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid; 11. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.	
	Keterampilan Khusus	

	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya pada Hukum Tata Negara (Siyasah) 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Hukum ketatanegaraan berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan baik; 7. Menguasai keterampilan terkait Hukum Tata Negara (Siyasah); 8. Mampu membuat kontrak dan menjelaskan kontennya yang berdasarkan syariah dengan pertimbangan hukum yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan perusahaan atau pihak tertentu; 9. Mampu membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian dan Mampu memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa;; 10. Mampu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan setiap perkara.	
--	---	--

	yang diajukan kepada pengadilan, dan Mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan pendapat hukum jika diminta pemerintah; 11. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, membuat akta-akta permohonan banding, pemberitahuan, permohonan banding, penyampaian memori/ kontra memori banding, permohonan kasasi, dan permohonan peninjauan; 12. Mampu mendesain dan menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta surat permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali suatu perkara di pengadilan agama dan mampu menganalisis perkara-perkara dan yurisprudensi secara baik dan mendalam; 13. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang Hukum Ekonomi Syariah baik di dalam maupun di luar pengadilan. 14. Mampu menganalisis fenomena masyarakat yang bersinggungan dengan ketatanegaraan, ketatanegaraan Islam, dan politik Islam 15. Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak dalam bidang hukum pada umumnya dan ketatanegaraan pada khususnya, memediasi para pihak terkait sengketa bidang Prodi Hukum Tata Negara, sengketa dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi, serta dapat melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional. 16. Mampu memberikan dan menciptakan politik yang sejalan dengan cita – cita Negara adil dan makmur dalam menjalankan sebuah birokrasi hukum 17. Mampu menyusun Legal dan Contract Drafting (akad, perundang-undangan) di berbagai lembaga secara jelas, terarah dan kontekstual.	
--	---	--

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian pembelajaran Prodi Hukum Tata Negara mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang handal, berketerampilan, memiliki jiwa inovatif dan kreatif serta profesional.

H. STRUKTUR KURIKULUM

Adapun struktur kurikulum program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) terdiri dari mata kuliah penciri nasional sebanyak 8 sks, mata kuliah penciri Universitas sebanyak 21 sks, mata kuliah penciri fakultas 23 sks namun tidak termasuk dengan PKL dan KKN, dan 64 sks untuk mata kuliah penciri program studi yang terdiri dari mata kuliah wajib prodi dan mata kuliah pilihan prodi, dan 40 sks mata kuliah kampus merdeka dengan sistem mata kuliah kampus merdeka reguler, kemudian ditawarkan pula mata kuliah kampus merdeka lintas prodi di dalam kampus, dan juga lintas prodi antar Perguruan Tinggi, serta praktik atau magang di luar kampus. Kumulatif SKS minimal 159 sks yang harus diambil untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Adapun struktur mata kuliah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Struktur Mata Kuliah Prodi Hukum Tata Negara

No	KODE MK	Sifat	Mata Kuliah	Bobot	Total SKS
1	MKPN020301	Wajib Nasional	Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah	2	8
2	MKPN020302	Wajib Nasional	Civic Education	2	
3	MKPN020303	Wajib Nasional	Pancasila	2	
4	MKPN020304	Wajib Nasional	Islam dan Moderasi Beragama	2	
1	UINSI020301	Wajib Universitas	Bahasa Arab	2	18
2	UINSI020302	Wajib Universitas	Bahasa Inggris	2	
3	UINSI020303	Wajib Universitas	Pengantar Ilmu Fiqih	2	
4	UINSI020304	Wajib Universitas	Ulumul Hadits	2	
5	UINSI020305	Wajib Universitas	Ulumul Qur'an	2	
6	UINSI020306	Wajib Universitas	Filsafat Umum	2	
7	UINSI020307	Wajib Universitas	Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2	
8	UINSI020308	Wajib Universitas	Sejarah Peradaban Islam	2	
9	UINSI020309	Wajib Universitas	Pengantar Ushul Fiqih	2	
10	UINSI020310	Wajib Universitas	Seminar Proposal	0	
11	UINSI020311	Wajib Universitas	Ujian Komprehensif	0	

12	UINSIO20312	Wajib Universitas	Skripsi	6	
----	-------------	-------------------	---------	---	--

1	FS020301	Wajib Fakultas	Pengantar Ilmu Hukum	2	29
2	FS020302	Wajib Fakultas	Fiqih Ibadah	2	
3	FS020303	Wajib Fakultas	Tarikh Tasyri'	2	
4	FS020304	Wajib Fakultas	PTHI	2	
5	FS020305	Wajib Fakultas	Filsafat Hukum	2	
6	FS020306	Wajib Fakultas	Hukum Pidana	2	
7	FS020307	Wajib Fakultas	Hukum Perdata	2	
8	FS020308	Wajib Fakultas	Tafsir Ahkam	2	
9	FS020309	Wajib Fakultas	Hadits Ahkam	2	
10	FS020310	Wajib Fakultas	Metodologi Penelitian	2	
11	FS020311	Wajib Fakultas	Metode Studi Islam	3	
12	FS020312	Wajib Fakultas	Hukum Agraria dan Perwakafan	3	
13	FS020313	Wajib Fakultas	Metodologi Penelitian Hukum	3	
14	FS020214	Wajib Fakultas	PKL Integratif	10	
15	FS020215	Wajib Fakultas	KKN Tematik	10	

1	HTN020301	Prodi Inti	HTN	3	46
2	HTN020302	Prodi Inti	HAN	2	
3	HTN020303	Prodi Inti	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	
4	HTN020304	Prodi Inti	Ilmu Negara	2	
5	HTN020305	Prodi Inti	Pengantar Ilmu Politik	2	
6	HTN020306	Prodi Inti	Legal Drafting	3	
7	HTN020307	Prodi Inti	Fiqih Jinayah	2	
8	HTN020308	Prodi Inti	Fiqih Siyasah	2	
9	HTN020309	Prodi Inti	Ilmu Perundang - undangan	2	
10	HTN020310	Prodi Inti	Hukum Parpol dan Sistem Pemilu	2	
11	HTN020311	Prodi Inti	Hukum Acara Peradilan MK	3	
12	HTN020312	Prodi Inti	Pengujian Peraturan Perundang - undangan	3	
13	HTN020313	Prodi Inti	Teori Hukum dan konstitusi	2	
14	HTN020314	Prodi Inti	Hukum Acara PTUN	3	
15	HTN020315	Prodi Inti	Hukum Islam dan HAM	2	
16	HTN020316	Prodi Inti	Hukum Acara Pidana	3	
17	HTN020317	Prodi Inti	Hukum Acara Perdata	3	
18	HTN020318	Prodi Inti	demokrasi dan Hukum Islam	3	
19	HTN020318	Prodi Inti	Etika politik dalam Islam	2	

1	HTN020319	Pengembangan Prodi	Fikih Munakahat	2	18
2	HTN020320	Pengembangan Prodi	Ushul Fiqih dan Qawaidh Fiqhiyyah	2	
3	HTN020321	Pengembangan Prodi	Fiqih Muamalah	2	

4	HTN020322	Pengembangan Prodi	Fiqih Mawaris	2	
5	HTN020323	Pengembangan Prodi	Masailul Fiqhiyah	3	
6	HTN020324	Pengembangan Prodi	Fiqih Muqarin	2	
7	HTN020325	Pengembangan Prodi	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	
8	HTN020326	Pengembangan Prodi	Advokator	3	
1	HTN020329	Prodi Pilihan	Hukum Lingkungan	2	8
2	HTN020330	Prodi Pilihan	Ilmu Pemerintahan	2	
3	HTN020331	Prodi Pilihan	hukum dan Kebijakan Publik	2	
4	HTN020332	Prodi Pilihan	Fiqih Zakat	2	
5	HTN020333	pilihan*	Organisasi dan Manajemen Pemerintah	2	
6	HTN020334	pilihan*	Hukum Inter Nasional	2	
7	HTN020335	pilihan*	pemikiran Politik Islam	2	
8	HTN020336	pilihan*	Kewirausahaan	2	
61 MATA KULIAH			JUMLAH SKS	161	127

Tabel di atas menjelaskan tentang struktur mata kuliah pada Prodi Hukum Tata Negara beserta rangkaian paket tawaran mata kuliah berbasis reguler dan juga merdeka belajar-kampus merdeka. Terdapat mata kuliah penciri nasional yang wajib diambil, juga mata kuliah penciri universitas yang mengacu kepada mata kuliah wajib Perguruan Tinggi Islam, juga mata kuliah wajib Fakultas sebagai penciri Fakultas Syariah, mata kuliah wajib Prodi dan juga mata kuliah pilihan, serta mata kuliah kampus merdeka yang diberikan beberapa opsi diantaranya adalah paket mata kuliah reguler pada semester V (lima) sebagai opsi pertama, kemudian disertakan pula opsi kedua yaitu mengambil mata kuliah lintas Prodi pada Prodi Hukum Tata Negara, juga mata kuliah lintas Fakultas di Perguruan Tinggi yang sama yaitu prodi KPI pada fakultas FUAD Pada semester VI mahasiswa juga ditawarkan mata kuliah dan paket kampus merdeka dengan opsi mengambil mata kuliah pada prodi, atau mengambil mata kuliah lintas Perguruan Tinggi yaitu prodi Peternakan Universitas Mulawarman, atau praktik/magang pada instansi tertentu yang telah bekerjasama dengan prodi Perguruan Tinggi, atau pertukaran mahasiswa ke Perguruan Tinggi yang ditentukan atau ditawarkan oleh Program Studi. Sehingga, untuk mendapatkan gelar “Sarjana Hukum”, mahasiswa wajib mengambil minimal 145 SKS.

Untuk paket magang, pertukaran mahasiswa, dapat diprogramkan mata kuliah yang direkognisi untuk menilai kegiatan tersebut. Adapun mata kuliahnya akan disebutkan pada sebaran mata kuliah program studi Hukum tata Negara (Siyasah)

Tabel 4 : Sebaran Mata Kuliah Prodi Hukum Tata Negara

SEMESTER I					
NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Total SKS
1	MKPN020301	Wajib Nasional	Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah	2	20
2	MKPN020302	Wajib Nasional	Civic Education	2	
3	MKPN020303	Wajib Nasional	Pancasila	2	
4	MKPN020304	Wajib Nasional	Islam dan Moderasi Beragama	2	
5	UINSI020301	Wajib Universitas	Bahasa Arab	2	
6	UINSI020303	Wajib Universitas	Pengantar Ilmu Fiqih	2	
7	UINSI020304	Wajib Universitas	Ulumul Hadits	2	
8	UINSI020305	Wajib Universitas	Ulumul Qur'an	2	
9	UINSI020306	Wajib Universitas	Filsafat Umum	2	
10	UINSI020307	Wajib Universitas	Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2	
			JUMLAH SKS	20	

SEMESTER II					
NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Totatl SKS
1	UINSI020308	Wajib Universitas	Sejarah Peradaban Islam	2	20
2	UINSI020309	Wajib Universitas	Pengantar Ushul Fiqih	2	
3	UINSI020302	Wajib Universitas	Bahasa Inggris	2	
4	FS020301	Wajib Fakultas	Pengantar Ilmu Hukum	2	
5	FS020302	Wajib Fakultas	Fiqh Ibadah	2	
6	FS020303	Wajib Fakultas	Tarikh Tasyri'	2	
7	FS020304	Wajib Fakultas	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	
8	FS020305	Wajib Fakultas	Filsafat Hukum	2	
9	FS020308	Wajib Fakultas	Tafsir Ahkam	2	
10	FS020309	Wajib Fakultas	Hadits Ahkam	2	
			JUMLAH SKS	20	

SEMESTER III					
NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Total SKS
1	FS020306	Wajib Fakultas	Hukum Pidana	2	23
2	FS020307	Wajib Fakultas	Hukum Perdata	2	
3	HTN020324	Pengembangan Prodi	Fiqh Muqarin	2	
4	HTN020304	Prodi Inti	Ilmu Negara	2	
5	HTN020305	Prodi Inti	Pengantar Ilmu Politik	2	
6	HTN020320	Pengembangan Prodi	Ushul Fiqih dan Qawaidh Fiqhiyyah	2	
7	FS020311	Wajib Fakultas	Metode Studi Islam	2	
8	HTN020310	Prodi Inti	Hukum Parpol dan Sistem Pemilu	2	
9	HTN020301	Prodi Inti	HTN	3	
10	HTN020329	Pilihan Prodi	Hukum Lingkungan	2	
11	HTN020330	Pilihan Prodi	Ilmu Pemerintahan	2	
12	HTN020333	pilihan*	Organisasi dan Manajemen Pemerintah	2	
13	HTN020334	pilihan*	Hukum Inter Nasional	2	
			JUMLAH SKS	23	

SEMESTER IV					
NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Total SKS
1	HTN020321	Pengembangan Prodi	Fiqh Muamalah	2	23
2	HTN020307	Prodi Inti	Fiqh Jinayah	2	
3	HTN020319	Pengembangan Prodi	Fikih Munakahat	2	
4	HTN020322	Pengembangan Prodi	Fiqh Mawaris	2	
5	FS020312	Wajib Fakultas	Hukum Agraria dan Perwakafan	3	
6	FS020310	Wajib Fakultas	Metodologi Penelitian	2	
7	HTN020313	Prodi Inti	Teori Hukum dan konstitusi	2	
8	HTN020309	Prodi Inti	Ilmu Perundang - undangan	2	
9	HTN020303	Prodi Inti	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	
10	HTN020331	Pilihan Prodi	hukum dan Kebijakan Publik	2	
11	HTN020332	Pilihan Prodi	Fiqh Zakat	2	
12	HTN020335	pilihan*	pemikiran Politik Islam	2	
13	HTN020336	pilihan*	Kewirausahaan	2	
			JUMLAH SKS	23	

SEMESTER V (LIMA) PAKET REGULER

NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Total SKS
1	HTN020308	Prodi Inti	Fiqih Siyasah	2	20
2	HTN020306	Prodi Inti	Legal Drafting	3	
3	FS020313	Wajib Fakultas	Metodologi Penelitian Hukum	3	
4	HTN020314	Prodi Inti	Hukum Acara PTUN	3	
5	HTN020326	Pengembangan Prodi	Advokator	3	
6	HTN020315	Prodi Inti	Hukum Islam dan HAM	2	
7	HTN020325	Pengembangan Prodi	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	
8	HTN020318	Prodi Inti	Etika politik dalam Islam	2	
			JUMLAH SKS	20	

SEMESTER V MERDEKA LINTAS PRODI HUKUM KELURGA (HK)

NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Total SKS
1	MBLF020308	Prodi Inti	Fiqih Siyasah	2	20
2	MBLF020306	Prodi Inti	Legal Drafting	3	
3	FS020313	Wajib Fakultas	Metodologi Penelitian Hukum	3	
4	HTN020314	Prodi Inti	Hukum Acara PTUN	3	
5	HTN020326	Pengembangan Prodi	Advokator	3	
6	MKKPS020116	Merdeka	Alternatif Penyelesaian Sengketa (prodi HK)	3	
7	MKKPS020119	Merdeka	Hukum Perkawinan (Prodi : HK)	3	
			JUMLAH SKS	20	

SEMESTER V MERDEKA LINTAS PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Totaal SKS
1	HTN020308	Prodi Inti	Fiqih Siyasah	2	20
2	HTN020306	Prodi Inti	Legal Drafting	3	
3	FS020313	Wajib Fakultas	Metodologi Penelitian Hukum	3	
4	HTN020314	Prodi Inti	Hukum Acara PTUN	3	
5	HTN020326	Pengembangan Prodi	Advokator	3	
6	HES020225	Merdeka	Hukum Bisnis Syariah	3	
7	HES020226	Merdeka	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	3	

			JUMLAH SKS	20	
--	--	--	-------------------	-----------	--

SEMESTER V (LIMA) : LINTAS PRODI KPI* (FUAD)

NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Tyotal SKS
1	HTN020308	Prodi Inti	Fiqih Siyasah	2	20
2	HTN020306	Prodi Inti	Legal Drafting	3	
3	FS020313	Wajib Fakultas	Metodologi Penelitian Hukum	3	
4	HTN020314	Prodi Inti	Hukum Acara PTUN	3	
5	HTN020326	Pengembangan Prodi	Advokator	3	
6	MKKIPS030218	Merdeka	Public Relations (Prodi: KPI)	3	
7	MKKIPS030219	Merdeka	Media Baru (Prodi K: KPI)	3	
			JUMLAH SKS	20	

SEMESTER VI (ENAM) : PAKET RREGULER

NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS	Total SKS
1	HTN020311	Prodi Inti	Hukum Acara Peradilan MK	3	20
2	HTN020312	Prodi Inti	Pengujian Peraturan Perundang - undangan	3	
3	HTN020316	Prodi Inti	Hukum Acara Pidana	3	
4	HTN020317	Prodi Inti	Hukum Acara Perdata	3	
5	HTN020318	Prodi Inti	demokrasi dan Hukum Islam	3	
6	HTN020323	Pengembangan Prodi	Masailul Fiqhiyah	3	
7	HTN020302	Prodi Inti	HAN	2	
			JUMLAH SKS	20	

SEMESTER VI (ENAM) PRAKTIK/MAGANG

NO	KODE MK	MATA KULIAH	LOKASI MAGANG	SKS	Tota SKS
			DITAWARAKAN		
1	MBM020301	Soft Skill :			20
		Integritas	Peradilan Tata Usaha Negara	2	
		Tanggungjawab	Kantor Dinas KEMENKUMHAM	2	
		Kerja Keras	Pengadilan Negeri	2	
		Kreativitas	Kantor BAWASLU Kota Samarinda	2	
2	MBM020301	Hard Skill :			

	Mendesain Program PKL	Kantor KPU Kota Samarinda	2	
	Melaksanakan magang	Kantor Advokasi/Pengacara	7	
	Laporan/presentasi/publikasi	Kantor Cabang Komisi Yudisial (KY)	3	
JUMLAH SKS			20	

SEMESTER VII (TUJUH) KKN TEMATIK dan SKRIPSI				
NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Total SKS
1	FS020215	KKN Tematik Kampus Merdeka		20
		Proposal dan presentasi	3	
		Melaksanakan Kegiatan	8	
		Membuat laporan dan presentasi	3	
2	MKPU020212	Skripsi	6	
		JUMLAH SKS	20	

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Total SKS
1	FS020216	KKN Tematik Kampus Merdeka		20
	FS020217	Proposal dan presentasi	3	
	FS020218	Pelaksanaan Kegiatan	8	
	FS020219	Laporan dan presentasi	3	
2	UINSI020212	Skripsi	6	
		Total Jumlah SKS Keseluruhan	146	

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 145 SKS yang harus diambil untuk program studi Hukum Tata Negara, dengan rincian penawaran 20 SKS pada semester I dan II, 23 SKS pada semester III dan IV, 20 SKS pada semester V, VI, dan VII. Semester VIII ditawarkan bagi mahasiswa yang mengambil paket reguler, yang belum mengambil program skripsi pada semester VIII (Tujuh).

Pada kurikulum merdeka belajar, Prodi Hukum Tata Negara menawarkan 3 opsi pada semester V dengan rincian, kurikulum mata kuliah reguler yang diambil di Prodi Hukum Tata Negara, atau mata kuliah merdeka belajar lintas Prodi ke Prodi Hukum Keluarga (HK) dan prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang masih 1 fakultas, juga dapat memilih tawaran merdeka belajar lintas Fakultas lain yakni FUAD di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Sedangkan pada semester VII, Prodi Hukum Tata Negara menyiapkan program KKN Tematik Merdeka Belajar sekaligus penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

I. RANCANGAN FASILITAS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, maka fasilitas merdeka belajar-kampus merdeka program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UINSI Samarinda meliputi Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi, Lintas Perguruan Tinggi, dan Magang/Praktik Kerja.

1. Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi

Rancangan pertukaran mahasiswa lintas prodi ini merupakan salah satu fasilitas bagi mahasiswa untuk penerapan merdeka belajar-kampus merdeka di Prodi Hukum Tata Negara. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan terkait dengan keilmuan ilmu hukum positif, politik islam dan ilmu ketatanrgaraan .

Adapun Prodi yang dipilih dalam lintas prodi ini adalah:

a) Lintas Fakultas sesama Universitas

Pemilihan prodi ini didasari atas pertimbangan dalam mengembangkan *knowledge* dan *skill* mahasiswa dalam menguasai keilmuan yang berkaitan dengan hukum dan sarana informasi secara umum. Dalam hal ini Prodi Hukum Tata Negara melakukan pertukaran mahasiswa pada prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam yang berada pada Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah, menjadi sasaran pertukaran mahasiswa lintas fakultas, dilandasi pertimbangan penguatan kompetensi lulusan Prodi Hukum Tata Negara dengan keilmuan yang berkaitan dengan keilmuan tentang

public relation dan media baru sebagai penguatan dalam mempublikasikan sebuah informasi social, hukum seperti opini sebuah politik dan mendalami tentang public speaking yang dapat menghasilkan wawasan yang memadai untuk berkiprah di bidang Hukum Tata Negara

2) Pertukaran Lintas prodi pada Fakultas yang sama,

Program ini dilakukan untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam menuntut ilmu, kemampuan untuk berinteraksi dengan suasana baru, menambah relasi, serta komunikasi yang baik adalah tujuan dari pola pertukaran lintas Perguruan Tinggi ini.

Dalam hal ini, Prodi Hukum Tata Negara akan melakukan pertukaran mahasiswa dengan Prodi/Jurusan muamalah prodi HK, dan jurusan Muamalah prodi HES mahasiswa lintas dengan demikian dapat menambah wawasan dan swasana belajar yang berbeda dari kelas sebelumnya.

3) Magang/Praktik Kerja

Program Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan magang atau praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di Instansi dan/atau lembaga terkait yang ditentukan oleh program studi. Kegiatan ini pula dikolaborasikan dengan kegiatan magang sebagai fasilitas penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Dari kaprodi memilih lokasi magang yang sudah bekerja sama dengan pihak kampus untuk bisa bermitra dalam pengembangan ilmu pd umunya dan tehnik/praktek pada khususnya.

Adapun mekanisme pelaksanaan Praktik/magang pada program studi Hukum Tata negara adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kerja sama dan mengadakan pertemuan dalam rangka menyamakan persepsi dengan pihak terkait yang menjadi tujuan atau lokasi tempat mahasiswa melakukan praktik/magang.

Untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Hukum Tata Negara, maka kerjasama perlu dilakukan dengan berdasarkan kepada profil lulusan program studi, yaitu:

1. Praktisi Hukum Tata Negara
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Negeri
 - c. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - d. Lembaga Bantuan Hukum
 - e. Borneo Mediation Center
 - f. Bawaslu
 - g. KPU
 - h. Mahkamah konstitusi
 - i. Komisi yudisial
 - j. lembaga Negara seperti pemerintah daerah dan DPR daerah maupun profesi

3. Mediator, Fasilitator dan Konsultan Hukum Tata Negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Menetapkan SK Mata kuliah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Pembimbing atau Supervisor lapangan bagi mahasiswa yang praktik/magang.
- 3) Memberikan Pengarahan dan pendampingan dalam melaksanakan program merdeka belajar-kampus merdeka.
- 4) Merancang mekanisme penilaian dan evaluasi praktik/magang.
- 5) Menyiapkan formulir penilaian, monitoring, dan evaluasi bagi pembimbing lapangan.
- 6) Menetapkan mata kuliah yang diakui sebagai komponen praktik/magang dan ditetapkan jumlah bobot SKS sebagai bagian dari prosedur dan proses pembelajaran yang dilakukan di luar program studi.

Tabel 5 : Mata Kuliah Reguler Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

NO	KATEGORI	MATKULIAH	SKS
1.	Mata Kuliah Kampus merdeka Reguler	Fiqih Siyasah	3
2.		Legal Drafting	3
3.		Metodologi Penelitian Hukum	2
4.		Hukum Acara PTUN	3
5.		Advokator	2
6.		Hukum Islam dan HAM	3
7.		Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
8.		Etika politik dalam Islam	2
9.		Organisasi dan Manajemen Pemerintah	2
10.		Hukum Internasional	2
	JUMLAH MATA KULIAH		24

Terdapat 24 SKS yang ditawarkan pada semester V (lima) bagian “REGULER” yang dapat diambil pada program studi Hukum Tata Negara, yang meliputi mata kuliah Hukum Acara Pidana, Perdata dan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha, dan advocator serta etika dan tanggung jawab profesi hukum sebagai mata kuliah yang harus dikuasai sebagai calon Sarjana Hukum. Adapun mata kuliah penguat dari keprodian adalah dengan adanya mata kuliah fiqih Siyasah Hukum islam dan HAM, Etika politik islam, organisasi dan manajemen pemerintah serta Hukum internasional yang mana semua ini adalah menjadi penguat dalam

mengimbangi isu – isu politik dan isu hukum islam sebagai respon dinamika perkembangan ilmu sehingga memiliki khazana keilmu yang berkopentensi dalam pencapaian lulusan keprodian Hukum tata Negara (Siyasah) tidak hanya muri sebagai disiplin ilmu hukum positif tapi juga hukum islam.

Tabel 6 : Mata Kuliah Lintas Prodi HK Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

NO	KATEGORI	MATKULIAH	SK S
1.	Mata Kuliah Kampus merdeka Lintas Prodi Hukum Keluarga	Fiqih Siyasah	3
2.		Legal Drafting	3
3.		Metodologi Penelitian Hukum	3
4.		Hukum Acara PTUN	3
5.		Advokator	2
6.		Alternatif Penyelesain Sengketa (prodi HK)	3
7.		Hukum Perkawinan (Prodi : HK)	3
	JUMLAH		20

Selain paket reguler, Prodi Hukum Tata Negara juga menyiapkan mata kuliah lintas Program Studi pada Fakultas yang sama yaitu Prodi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah. Terdapat 20 SKS yang ditawarkan dengan mata kuliah kampus merdeka lintas Prodi yakni menambahkan mata kuliah alternative Penyelesaian sengketa dan mata kuliah Hukum Perkawinan yang ada pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Keberadaan mata kuliah tersebut sebagai penguat dalam merespon permasalahan atau sengketa dalam dunia hukum keperdataan islam yang mana hal tersebut adalah matakuliah yang relevansi dengan kepengacaraan atau menjadi advokat Konsultan hukum

Tabel 7 : Mata Kuliah Lintas Prodi HES Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

NO	KATEGORI	MATKULIAH	SK S
1.	Mata Kuliah Kampus merdeka Lintas Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Fiqih Siyasah	3
2.		Legal Drafting	3
3.		Metodologi Penelitian Hukum	3
4.		Hukum Acara PTUN	3
5.		Advokator	2
6.		Hukum Bisnis Syariah	3
7.		Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	3
	JUMLAH		20

Pada mata kuliah lintas prodi berikutnya memiliki jumlah SKS yang sama dengan lintas Prodi byang sebelumnya yaitu 20 SKS, perbedaannya hanya ada 2 mata kuliah penciri dari prodi lintasan tersebut adalah lintas prodi Hukum ekonomi Syariah (HES) yang masih dalam satu fakultas yakni fakultas Sayariah UINSI Samarinda. Tujuan dari lintas fakultas dengan adanya mata kuliah Hukum Bisnis dan matakuliah Kompilasi Hukum ekonomi Syariah

Mata kuliah penciri tersebut menjadi penguat mahasiswa dalam pengembangan ilmu ekonomi dan analisis kasus perekonomian yang merupakan relefansinya dalam merespon perkembangan kasus dan bukan hanya isu politik dan sosial tapi juga isu – isu perekonomian yang semakin berkembang dalam dunia bisnis modern serta sebagai nilai plus dalam menetapkan sebuah kebijakan public atau produk hukum yang secara mareriilnya berisikan tentnag ekonomi dan bisnis secara global.

Tabel 8 : Mata Kuliah Lintas Fakultas (FUAD) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

NO	KATEGORI	MATKULIAH	SK S
1.	Mata Kuliah Kampus merdeka Lintas Fakultas (FUAD)	Fiqih Siyasah	3
2.		Legal Drafting	3
3.		Metodologi Penelitian Hukum	3
4.		Hukum Acara PTUN	3
5.		Advokator	2
6.		Public Relations (Prodi: KPI)	3
7.		Media Baru (Prodi K: KPI)	3
	JUMLAH		20

Selain dari lintas prodi antar Fakultas, prodi Hukum tata Negara juga menawarkan lintas Fakultas namun masih dalam satu Uiniversitas yang sama yakni UINSI Samarinda dengan tawaran kampus merdeka pada Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah (FUAD) pada prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Jumlah SKS nya pun mash sama yaitu 20 SKS dengab 2 mata kuliah yng berbeda dari ilmu hukum yakni mata kuliah Publik Relation dan mata kuliah Media Baru Keunggulan pada lintas fakultas tersebut adalah menjadi penguat bagi lulusan prodi Hukum Tata Negara pada penambahan wawasan keilmuan dalam mempublikasikan sebuah kebijakan atau pun sebuah legal opini. Dengan demikian lulusan HTN dapat menambah khazanah keilmuan dalam mempublikasikan suatu isu –isu social,hukum dan politik serta melatih dalam vokal bagian dari keterampilan berbicara /public Speaking di media masa atau media social yang merupakan bagian dari komunikasi public.

Sementara itu, untuk mata kuliah merdeka belajar-kampus merdeka semester VI, mahasiswa ditawarkan 2 (opsi) pola perkuliahan, yaitu opsi pertama dengan paket perkuliahan reguler dengan jumlah 22 SKS dan 8 mata kuliah, atau opsi ke dua dengan praktik/magang yang dapat dihargai setara dengan 20 SKS dengan melakukan mekanisme magang, dengan metode *hard skill*, dan *soft skill*, juga disempurnakan dengan laporan penelitian yang setara dengan 10 SKS.

Pilihan paket mata kuliah reguler kampus merdeka yang ditawarkan Prodi Hukum Tata Negara pada semester VI ini ada peningkatan penguasaan keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang meliputi; Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Peraturan Perundang – undangan, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Demokrasi dan Hukum Islam, masailul Fiqhiyah, Hukum Administrasi Negara dan sosiologi Politik. Sebanyak 20 SKS harus diselesaikan pada semester VI ini dengan 7 mata kuliah wajib.

SEMESTER VI (ENAM)				
PRAKTIK/MAGANG				
NO	MATA KULIAH	LOKASI MAGANG	SKS	Tota SKS
		DITAWARAKAN		
1	Soft Skill :	Peradilan Tata Usaha Negara Kantor Dinas		20
	Integritas		2	
	Tanggungjawab		2	
3.	Mata Kuliah semester VI Reguler	Hukum Acara Pidana		3
4.		Hukum Acara Perdata		3
5.		demokrasi dan Hukum Islam		2
6.		Masailul Fiqhiyah		3
7.		HAN		3
8.		sosiologi politik		2
	JUMLAH			22

Tabel 9 :
Mata Kuliah
Reguler
semester VI

Opsi tawaran yang ke dua adalah Kurikulum merdeka dalam bentuk magang/pakterk yang dapat dinilai sebanyak 20 SKS dengan ketentuan meliputi ketercapaian *soft skill* dan *hard skill* yang telah ditetapkan dari program praktik/magang tersebut. Dengan penerapan model magang pada semester VI ini diharapkan dapat mematangkan pengalaman tehnik lapangan kepada mahasiswa sehingga memudahkan akses dalam mengembangkan keilmuan (secara teori) ketatanegaraan yang ada di Fakultas syariah. Tidak hanya kematang dalam ilmu hukum positif saja tapai juga ilmu hukum Islam (Siyasah).

Tabel 10 : Ketentuan SKS Praktik/Magang semester VII

	Kerja Keras	KEMENKUMHAM Pengadilan Negeri	2
	Kreativitas	Kantor BAWASLU Kota Samarinda	2
2	Hard Skill :		
	Mendesain Program PKL	Kantor KPU Kota Samarinda	2
	Melaksanakan magang	Kantor Advokasi/Pengacara	7
	Laporan/presentasi/publikasi	Kantor Cabang Komisi Yudisial (KY)	3
JUMLAH SKS			20

Pada ketentuan semester VII mahasiswa diberikan tawaran dalam bentuk 2 opsi, yaitu tawaran yang pertama adalah semester VII “Reguler”, yang mana regular yang dimaksudkan adalah dengan mengikuti alur perkuliahan seperti biasa yaitu dengan adanya program KKN (4 SKS) dan PKL (4 SKS) serta Skripsi (6 SKS)

Tabel 11 : Ketentuan Program KKN Tematik dan Skripsi (semester VII)

Kategori dan Ketentuan		Jumlah SKS
KKN Tematik Kampus Merdeka		20
Proposal dan presentasi	3	
Melaksanakan Kegiatan	8	
Membuat laporan dan presentasi	3	
Skripsi	6	

Table di atas menunjukkan adanya opsi kedua yang dikenal dengan istilah “merdeka” Pada semester VII mahasiswa ditawarkan program KKN/ Praktik Lapangan atau KKN Tematik yang disertakan dengan program Skripsi. Sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studinya selama 7 semester saja.

4) Mekanisme Pelaksanaan Praktik/Magang

Hal-hal yang harus disiapkan untuk pelaksanaan praktik/magang meliputi persiapan instansi yang dituju, persiapan mahasiswa dan juga persiapan bagi dosen pembimbing dan supervisor.

1) Persiapan bagi Instansi Tempat Praktik/Magang

Beberapa mekanisme pelaksanaan praktik/magang yang dilakukan adalah:

- a) Menyepakati program praktik/magang yang ditawarkan kepada mahasiswa;
- b) Pelaksanaan praktik/magang yang sesuai dengan prosedur dan menjamin kualitas yang diharapkan;
- c) Menjalankan kerjasama yang telah disepakati antara Program Studi dan juga Instansi terkait;
- d) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa selama magang;
- e) Memberikan hak dan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan praktik atau magang kepada program studi.

2) Persiapan Bagi Mahasiswa

Yang harus disiapkan mahasiswa sebagai peserta praktik/magang adalah:

- a) Memilih paket tawaran merdeka belajar-kampus merdeka yang telah disediakan;
- b) Berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik untuk mendaftar atau melamar serta mengikuti seleksi program magang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan prodi;
- c) Mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik dan mendapatkan dosen pembimbing/Supervisor magang berdasarkan ketetapan prodi;
- d) Melaksanakan praktik/magang dengan mematuhi semua aturan yang berlaku di instansi terkait;
- e) Mengisi log book sesuai dengan aktifitas yang dilakukan;
- f) Membuat laporan kegiatan, mempresentasikan hasil praktik dan menyampaikan laporan kegiatan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

3) Dosen Pembimbing dan Supervisor

Sebagai dosen pembimbing dan Supervisor praktik/magang, mesti mempersiapkan beberapa hal, diantaranya:

- a) Mendapatkan SK dan surat tugas dari Prodi/Fakultas untuk menjalankan tugas sebagai supervisor atau dosen pembimbing mahasiswa praktik/magang;
- b) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa bimbingan magang;
- c) Menjelaskan tugas-tugas dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa selama proses magang berlangsung dan sampai pelaporan kegiatan;
- d) Dosen pembimbing dan supervisor melakukan evaluasi dan memberikan penilaian kepada mahasiswa;
- e) Memberikan laporan penilain kepada program studi.

4) Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Program Kampus Merdeka yang lainnya adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik, dalam hal ini beberapa persiapan harus dilakukan baik dari pihak Perguruan Tinggi dan Program Studi, mahasiswa dan juga yang lainnya.

1) Perguruan Tinggi/ Program Studi

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

3) Pembimbing

- a. Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

4) Lokasi Pelaksanaan

- a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c. Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

5) Mitra

- a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b. Pemerintah Daerah.
- c. BUMN dan Industri.
- d. Social Investment.
- e. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).
- f. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus):
 - a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
 - b) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - c) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

6) Pendanaan

- a. Sumber Pendanaan
 - a) Perguruan Tinggi.
 - b) Mitra.
 - c) Sumber lain yang tidak mengikat.
 - d) Mahasiswa.
- b. Komponen Penggunaan Dana
 - a) Transportasi.
 - b) Biaya Hidup.
 - c) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
 - d) Biaya Program.
 - e) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.

- f) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

7) Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka

Menyongsong Program Studi yang menerapkan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, maka Prodi Hukum Tata Negara menawarkan pula program pertukaran mahasiswa.

1) Defenisi Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa merupakan sebuah program pertukaran mahasiswa selama 1 semester ke Perguruan Tinggi tertentu baik di dalam maupun luar negeri.

2) Tujuan Pertukaran Mahasiswa

Adapun tujuan dari pertukaran mahasiswa ini adalah untuk:

- Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem dan teknik pembelajaran di Universitas yang berbeda.
- Mampu menyesuaikan diri dengan pembelajaran baru di Perguruan Tinggi penerima pertukaran mahasiswa.
- Mampu berkomunikasi dengan dosen, staf dan teman mahasiswa di perguruan tinggi penerima.
- Memberikan pengalaman kemampuan beradaptasi cepat dengan tempat yang dituju.
- Mendapatkan wawasan dan pengalaman baru sesuai dengan bidang yang dituju pada Perguruan Tinggi penerima.

3) Syarat Pertukaran Mahasiswa

Untuk melaksanakan pertukaran mahasiswa, calon peserta harus melengkapi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi dalam Negeri

Beberapa syarat yang harus dipenuhi peserta pertukaran mahasiswa di Perguruan Tinggi dalam Negeri adalah:

- Minimal semester V
- Minimal IPK 3.00
- Mengisi formulir pendaftaran
- Biaya ditanggung mahasiswa
- Menyertakan sertifikat prestasi atau penghargaan

Melengkapi berkas:

- Foto kopi KTP
- Foto kopi KTM
- Foto kopi Kartu Keluarga
- d. Transkrip Nilai
- e. Surat aktif kuliah dari Perguruan Tinggi
- f. Surat Pernyataan bersedia mengikuti pertukaran pelajar

- g. Surat berkelakuan baik dari Perguruan Tinggi Asal (tidak pernah dikenakan sanksi oleh Perguruan Tinggi).
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau Puskesmas (Negeri atau Swasta).

2. Syarat Pertukaran Mahasiswa Perguruan Tinggi Luar Negeri

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Perguruan Tinggi Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Minimal semester V
- b) Minimal IPK 3.5
- c) Memiliki TOEFL score minimal 500, atau IELTS minimal Band 6 d) Menyertakan sertifikat prestasi atau penghargaan
- e) Mengisi formulir pendaftaran
- f) Biaya ditanggung mahasiswa g) Melengkapi berkas:
 - 4. Pasport
 - 5. Foto kopi KTM
 - 6. Transkrip Nilai
 - 7. Surat aktif kuliah dari Perguruan Tinggi
 - 8. Surat Pernyataan bersedia mengikuti pertukaran mahasiswa
 - 9. Surat berkelakuan baik dari Perguruan Tinggi Asal (tidak pernah dikenakan sanksi oleh Perguruan Tinggi).
 - 10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau Puskesmas (Negeri atau Swasta).

b. Mekanisme Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

Untuk pelaksanaan pertukaran mahasiswa, Prodi Hukum Hukum tata Negara (Siyasah) menawarkan pilihan diantaranya:

- 1. Mahasiswa ditawarkan untuk mengambil sebanyak 20 sks di Perguruan Tinggi penerima. Dalam hal ini pemograman pemilihan mata kuliah ini baru bisa dilaksanakan setelah selesai proses perekrutan dan pendaftaran mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa di Prodi tertentu di Perguruan Tinggi penerima.
- 2. Peserta pertukaran mahasiswa dapat mengkombinasikan antara memilih minimal 10 sks mata kuliah di Perguruan Tinggi Penerima, dan 10 sks mata kuliah di Perguruan Tinggi lainnya (dilaksanakan secara daring/Online).
- 3. Mahasiswa dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan kegiatan dan program yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi penerima, baik yang berbentuk mata kuliah, maupun kegiatan ekstra kulikuler maupun praktik.

c. Persiapan Pertukaran Mahasiswa

Berkaitan dengan persiapan, ada beberapa pihak yang harus mempersiapkan pelaksanaan pertukaran mahasiswa, yaitu perguruan tinggi, program studi, mahasiswa dan juga perguruan tinggi penerima.

a. Perguruan Tinggi Pengirim

Harus mempersiapkan diantaranya adalah:

- a) Nota Kesepahaman/MOU antara kedua Perguruan Tinggi.
- b) Memfasilitasi pelaksanaan program pertukaran mahasiswa termasuk jika ada biaya/insentif/ bantuan yang dapat dipergunakan untuk mensukseskan pertukaran mahasiswa.
- c) Memberikan izin kepada mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa.

b. Program Studi

Persiapan yang harus dilakukan adalah:

- a) Mengumumkan program pertukaran mahasiswa
- b) Menerima pendaftaran dan melakukan seleksi perekturan peserta pertukaran mahasiswa.
- c) Menyusun panitia dan menetapkan supervisor pertukaran mahasiswa.
- d) Menetapkan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan, dan jumlah sks program pertukaran mahasiswa.
- e) Berkomunikasi aktif dengan perguruan tinggi penetima.
- f) Memberikan pengarahan dan pendampingan kepada peserta pertukaran mahasiswa.

c. Mahasiswa

Persiapan yang harus dilakukan adalah:

- a) Mendaftar menjadi peserta pertukaran mahasiswa
- b) Menyediakan biaya pertukaran mahasiswa (jika tidak mendapatkan bantuan dari Perguruan Tinggi)
- c) Melengkapi berkas persyaratan
- d) Mempersiapkan diri untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa.

d. Perguruan Tinggi Penerima

Sebagai Perguruan Tinggi penerima, maka juga harus mempersiapkan:

- a) Menyediakan fasilitas pertukaran mahasiswa
- b) Menentukan program studi yang dapat diambil peserta selama pertukaran mahasiswa
- c) Menunjuk supervisor lapangan untuk peserta pertukaran mahasiswa
- d) Memberikan penilaian dan evaluasi kepada mahasiswa.
- e) Berkomunikasi aktif dengan perguruan tinggi asal/pengirim pertukaran mahasiswa.

5) Penelitian/Riset

Mahasiswa yang memiliki *passion* di bidang penelitian, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Penelitian dapat membangun cara berfikir mahasiswa untuk kritis, sehingga dapat mendalami, memahami, dan menerapkan metode riset secara lebih baik. Kegiatan penelitian ini dapat dilakukan 1 semester selama 6 bulan. Teknik pelaksanaan dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi dengan instansi, atau menjadi asisten peneliti.

Tujuan dari program penelitian:

- a. Meningkatkan mutu, menambah pengalaman proyek riset untuk memperkuat *pool talent* secara topikal.
- b. Mendapatkan kompetensi melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan Sumber Daya Peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MOU/SPK).
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
4. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
5. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
6. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
7. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

1. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
2. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
3. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Mahasiswa

1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
2. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

J. KETENTUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PRODI HUKUM TATA NEGARA

Untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka, Program Studi menetapkan beberapa ketentuan, diantaranya adalah:

1. Setiap paket kurikulum Merdeka Belajar akan ditawarkan mulai semester V.
2. Setiap paket Kurikulum Merdeka Belajar, minimal harus dipilih/diprogramkan oleh 10 orang mahasiswa, jika kurang dari nominal tersebut, maka paket tidak dibuka, dan mahasiswa ditawarkan untuk mengambil pilihan yang lain.
3. Seluruh mahasiswa wajib melakukan pemograman KRS merdeka belajar berdasarkan instruksi dari Program Studi.
4. Mahasiswa yang tidak mengambil paket mata kuliah di luar prodi, Fakultas, atau Perguruan Tinggi, diperkenankan mengambil mata kuliah pada prodi HES dengan ketentuan diprogram oleh minimal 10 orang.

K. PENUTUP

Demikianlah kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini disusun, sebagai acuan dan pedoman dalam penerapan kurikulum Kampus Merdeka, serta disesuaikan dengan Prodi lulusan, yang disempurnakan dengan keilmuan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran dan mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia khususnya pada lulusan Sarjana Hukum pada bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Kurikulum ini dapat dirubah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang berlaku di kemudian hari.